

**MEMAHAMI
KONFLIK PERTAMBAHAN**

RACHMAN WIRIOSUDARMO

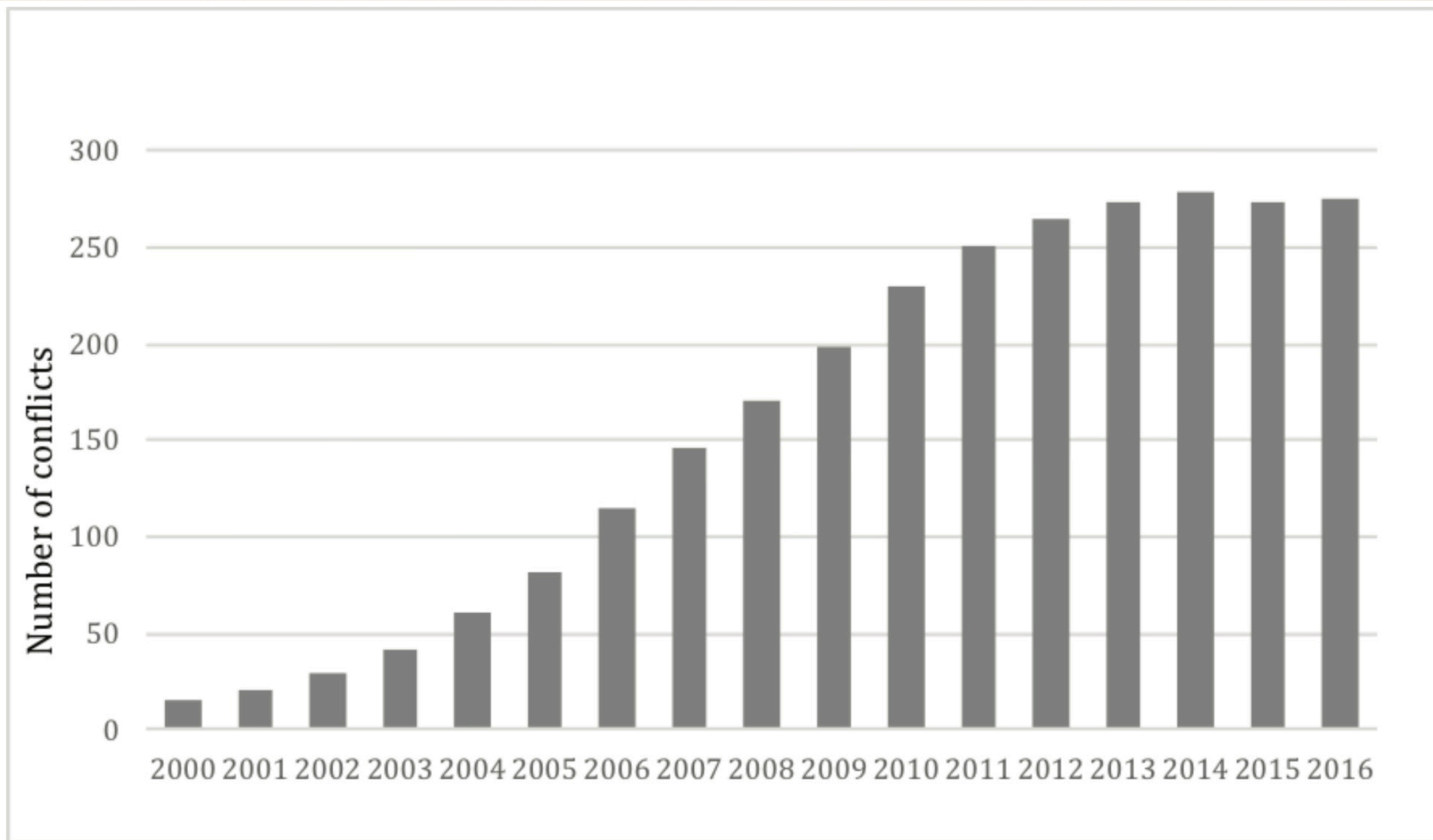
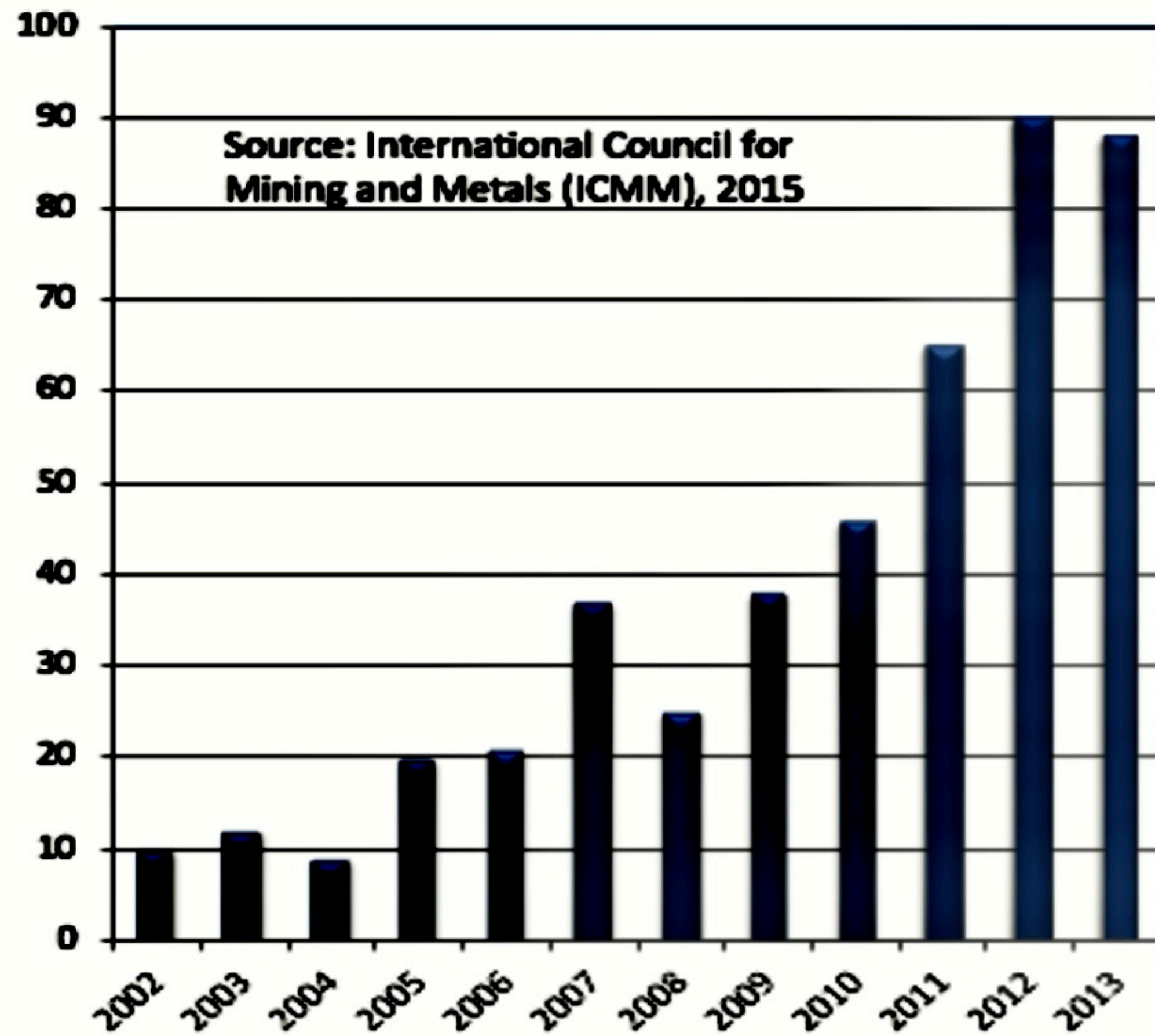
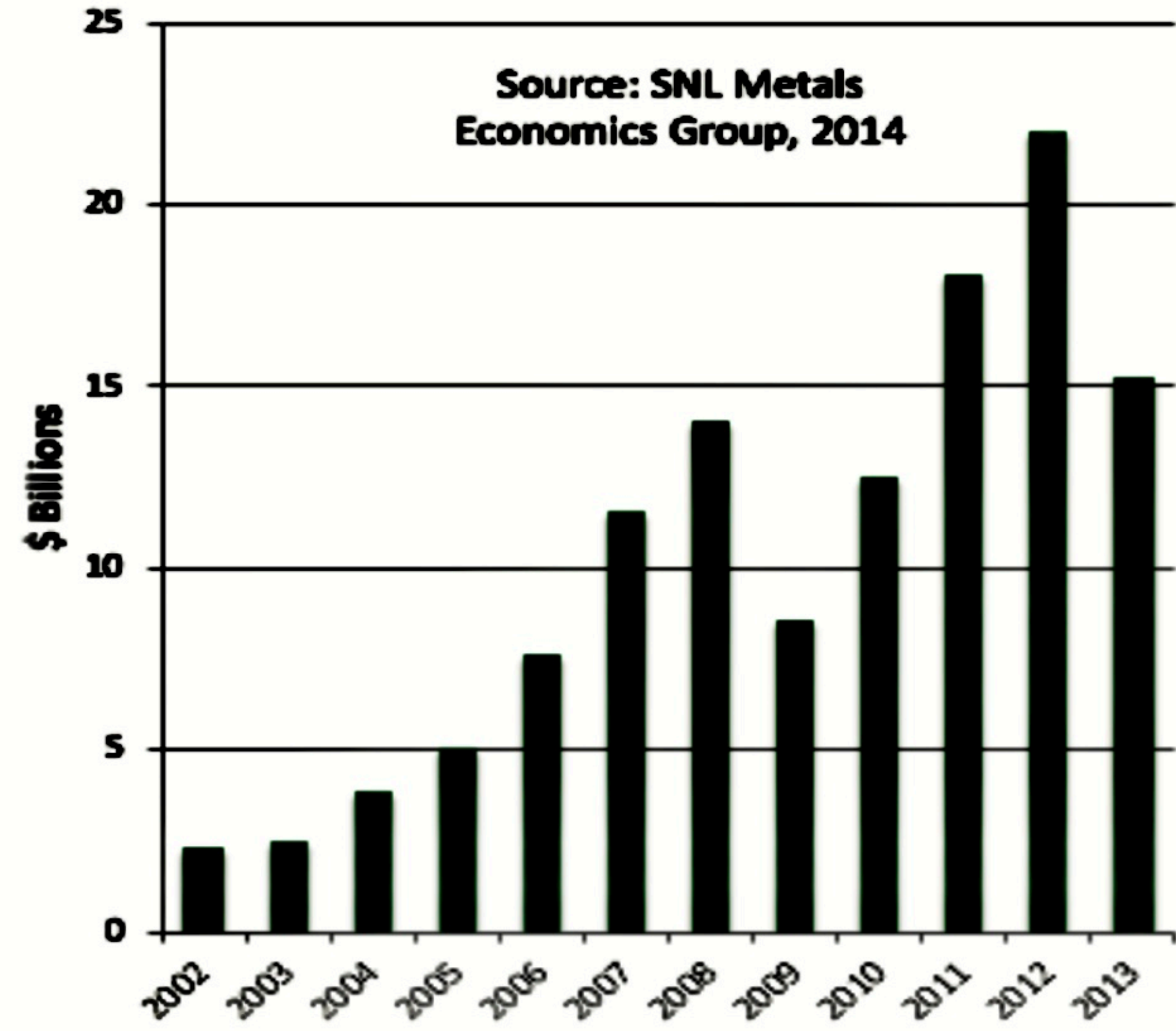


Figure 1.0. Cumulative number of new mining conflicts in the world (2000-2016), Source: EJ Atlas (<http://ejatlas.org>)

Conflict Incidents by Year



Annual Exploration Expenditures

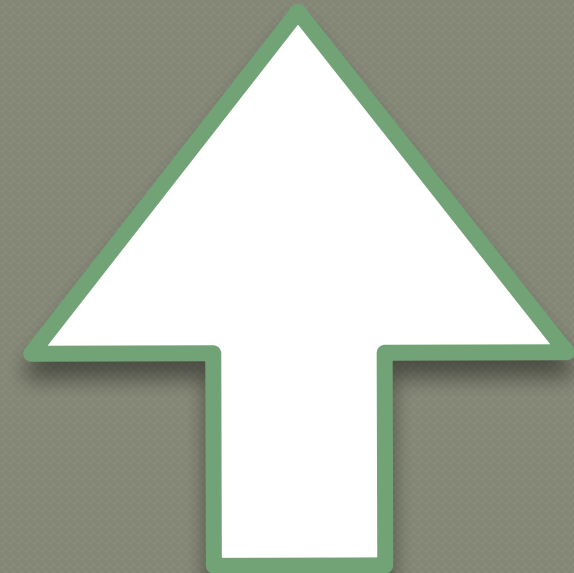


0.1. Rise in conflict incidents associated with mining coincident with the commodity boom

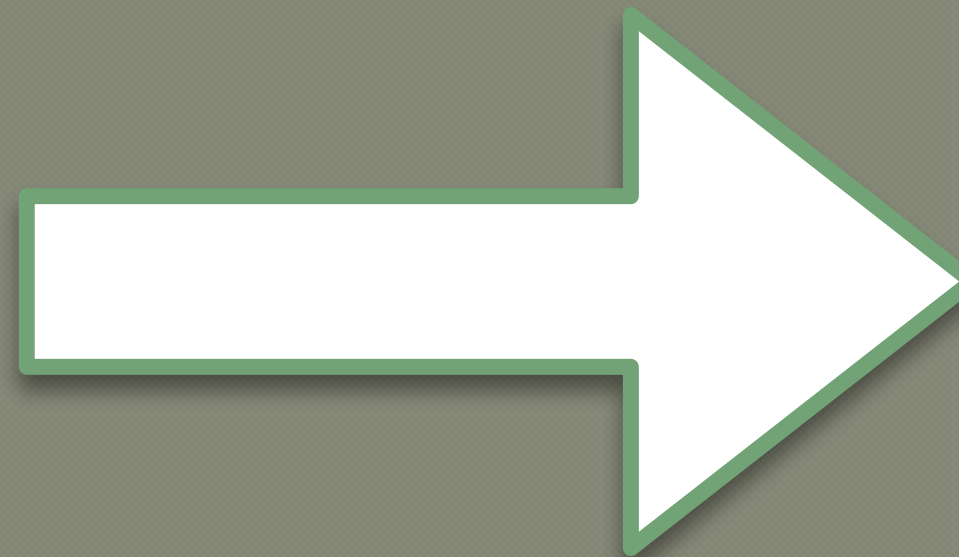
THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE

Semua orang berhak atas persamaan untuk mengakses kesejahteraan, kesehatan, keadilan, privasi, dan peluang, tanpa memandang status legal, politik, ekonomi, serta kondisi lain.

5 PRINCIPLES



teori
hukum
naluri

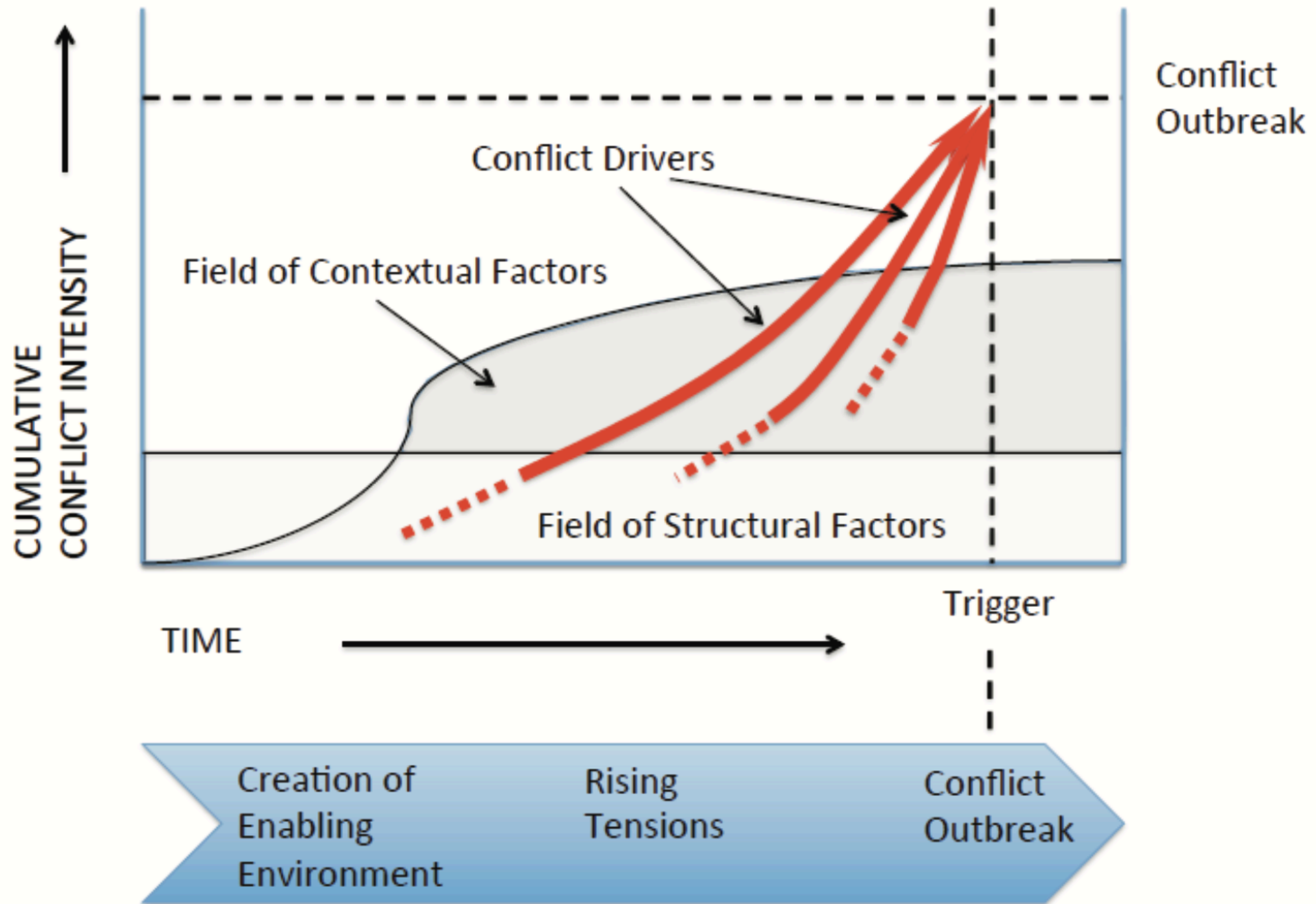


- 1.access
- 2.equity
- 3.diversity
- 4.participation
- 5.human right

the principle of social justice pemanfaatan kekayaan alam

- Dalam hal kekayaan alam di suatu wilayah dikembangkan dengan **biaya sosial** maka setiap orang harus mendapat kemanfaatan
- Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban memberikan kemanfaatan kepada masyarakat
- Dalam hal pemerintah gagal memberikan kemanfaatan, maka masyarakat akan menuntut kemanfaatan dari pengembang kekayaan alam

SUMBER KONFLIK



FAKTOR STRUKTURAL

KEBIJAKAN PEMERINTAH



LIBERAL



Konflik :
Korporasasi x masyarakat



EXTRACTIVIST

(Interventionist measures)



Konflik :
Pemerintah x korporasi
Pemerintah x masyarakat

LIBERAL

KONFLIK KORPORASI - MASYARAKAT

- Semua terserah korporasi (pemerintah tidak hadir)
- Pemerintah fokus pada pendapatan finansial
- Kepentingan masyarakat terabaikan

EXTRACTIVIST

(Interventionist measure)

KONFLIK

- PEMERINTAH - KORPORASI
- PEMERINTAH - MASYARAKAT

- Korporasi mendapat tekanan dari pemerintah
- Kepentingan nasional menjadi prioritas
- Kepentingan masyarakat terabaikan

FAKTOR KONTEKSTUAL

- Pertanian / lahan
- Lingkungan hidup / pencemaran
- Kemiskinan / kesenjangan
- Budaya dan tatanan sosial
- Politik lokal
- Pertentangan kepentingan dalam masyarakat

PEMICU KONFLIK

- Ingkar dari perjanjian
- Permintaan yang meningkat (the rising demand)
- Kepentingan pihak luar (provokasi)
- Echo effect (efek gema)
- Response negatif oleh pemerintah / parlemen
- The rising demand dari masyarakat

MASYARAKAT (community)

Adalah kelompok warga di sekitar atau yang terdampak kegiatan pertambangan

STAKEHOLDER

Adalah berbagai perorangan, kelompok, lembaga yang berkepentingan terhadap persoalan dan dampak pertambangan

PENDEKATAN KOMPENSASI

- Sulit menentukan standard besaran harga
- Tidak pernah memuaskan
- Negosiasi antara pihak yang tidak berimbang
- Bom waktu yang sewaktu-waktu meledak

PENDEKATAN PARTISIPASI

- Perlu keterlibatan sejak awal (explorasi)
- Perlu penjelasan terus menerus tentang kegiatan
- Perlu kejujuran dan transparansi
- Perlu keterlibatan seluruh warga (bukan hanya elit)

Masalah pemerintahan di wilayah pertambangan

- Tidak hadir di wilayah terpencil
- Kemampuan menyampaikan pelayanan rendah
- Kepercayaan warga rendah
- Pelayanan serba standard
- Harapan masyarakat tidak realistis

Kecemasan

- Terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat
- Terpisah dari habitat alamiahnya
- Kehilangan nilai-nilai budaya
- Tekanan dari pembauran dengan pihak pendatang
- Ketidakberdayaan
- Tidak menemukan jalan keluar

Pemahaman tentang ketidakpastian

- Peran tanah dan budaya
- Nilai ekonomi tanah
- Ketidakpastian tanah di masa depan
- Hilangnya sumber daya tradisional
- Ketidakmampuan untuk berpartisipasi
- Harapan berlebihan
- Kompensasi tidak mengatasi kecemasan

Dimensi sosial dalam perusahaan tambang

- Langka keahlian sosial
- Keahlian sosial dinomor duakan
- Aspek sosial tidak terstruktur dalam manajemen perusahaan
- Management sentralistik
- Tidak memahami karakteristik lokal

Table 1.0. Conflict governance rationales for the neoliberal and neo-extractive models

Development model	Neoliberal	Neo-extractivist
Prevention	<ul style="list-style-type: none"> • Attracting foreign companies with high capital and experience • Corporate conduct guidelines • Consultative processes between companies and communities 	<ul style="list-style-type: none"> • Promoting domestic mining companies and cooperatives • National-level regulation and unionization
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate social responsibility activities • Decentralization • Criminalization and repression of opposition to mining 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilization of population within national development discourse • Decentralization • Denunciation and repression of local communities 'standing in the way of progress'
Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • Monetary compensation and market-based alternative livelihoods options for affected communities 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximization of mining-related employment in affected areas

end



www.pushep.or.id

